

Analisis Pembangunan Wilayah Dalam Prespektif Indeks Kesejahteraan di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2006-2013

(Analysis Of Regional Development In The Prespective Of The Welfare Index In The Eks Karesidenan Besuki The Years 2006-2013)

Intan Wulandari, Badjuri., Nanik Istiyani

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)

Jln. Kalimantan 37, Jember 68121

E-mail: Intanwulandari541@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pembangunan wilayah yang ada di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2006-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan menggunakan analisis Indeks Williamson. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengelompokkan dan mengklasifikasi pola pertumbuhan yang ada di wilayah Eks Karesidenan Besuki menjadi 4 kuadran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita di Eks Karesidenan Besuki terhadap jumlah kemiskinan yang ada di Eks Karesidenan Besuki. Analisis Panel data digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel dengan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) yang terdiri dari data times series selama tahun 2006-2013 dan data cross section 4 kabupaten di Eks Karesidenan Besuki. Hasil Analisis ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketimpangan yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson. Hasilnya menunjukkan bahwa ke 4 kabupaten yang ada di Eks Karesidenan Besuki masih tergolong rendah dimana angka ketimpangan kurang dari 1. Dan Berdasarkan hasil dari analisis Tipologi Klasen ke 4 kabupaten yang ada di Eks Karesidenan Besuki masuk dalam kuadran IV (daerah relatif tertinggal). Dan Hasil analisis regresi data penel menunjukkan bahwa variabel laju pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan jumlah kemiskinan namun pengaruhnya tidak signifikan, sedangkan variabel pendapatan perkapita memiliki hubungan yang negatif dengan jumlah penduduk miskin dan berpengaruh signifikan.

Kata kunci : Produk Domestik Regional Bruto, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, dan Kemiskinan

ABSTRACT

This rasearch aims analyze the development of the region in the EKS Karesidenan Besuki 2006-2013 on year . The data used on this research is secondary data with analysis Williamson Index. The study also aimed to grouping and classify patterns of growth in the region EKS Karesidenan Besuki into 4 quadrants .The rasearch also aimed to determine the effect of economic growth and income percapita in region EKS Karesidenan Besuki to the amount of poverty that exist in region EKS Karesidenan Besuki . Analysis of Panel Data used to look at the effect of inter- variable approach with Fixed Effect Model (FEM), that consists of data times series during the years 2006 - 2013 and cross section 4 districts in region EKS Karesidenan Besuki. These results indicate that overall inequality shown by Williamson Index results show that all four districts in region EKS Karesidenan Besuki. The results is still relatively low inequality where the figure is less than 1. Based on the results of the analysis and typology Klasen into 4 districts in region EKS Karesidenan Besuki included in quadrant IV (relatively underdeveloped regions). And Regression analysis showed that the variables of data penel Economic Growth have a positive correlation with the amount of poverty , but the effect is not significant , while the variables income per capita has a negative correlation with the number of poor but the effect is significant.

Keywords : Gross Regional Domestic Product , Inequality , Economic Growth , Income Per Capita Income and Poverty

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dan Pemerataan ekonomi merupakan suatu hal yang harus dicapai dalam pembangunan ekonomi. Proses pembangunan ekonomi dilakukan dengan kurun waktu yang lama dan tahapan yang panjang, atau dengan kata lain pembangunan ekonomi lebih

dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Proses ini berlangsung dari mulanya pembangunan ekonomi dengan sistem agraris kemudian seiring berjalannya waktu mengalami transisi ke sistem ekonomi industri dan proses inilah yang nantinya merubah sistem ekonomi menjadi lebih berkembang dengan teknologi-teknologi efektif yang digunakan.

Manusia memiliki peranan penting karena manusia merupakan objek sekaligus subjek dari pembangunan itu, jadi setiap strategi, kemampuan dan perencanaan manusia sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan dalam sebuah negara. Kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari pembangun ekonomi. Sedangkan beberapa indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan dan pendapatan bersih masyarakat (pendapatan perkapita) bagi masyarakat.

Secara absolut jumlah penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan ternyata masih tinggi. Hampir disetiap negara kemiskinan selalu terpusat ditempat-tempat tertentu, yaitu biasanya di pedesaan atau daerah-daerah yang kekurangan sumber daya. Persoalan kemiskinan kini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi saja namun lebih meluas kini pengertian kemiskinan berkembang mencakup aspek-aspek kehidupan yang jauh lebih luas. Secara umum kemiskinan mencakup aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (*inequality*). Perbedaan ini sangat perlu ditekankan, kemiskinan berkaitan erat dengan standart hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standart hidup relatif dari seluruh masyarakat. Dan definisi kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standart hidup minimum. Kemiskinan merupakan permasalahan dasar bagi negara berkembang termasuk di Indonesia. Pengurangan kemiskinan menjadi hal penting yang harus tercapai dalam pembangunan suatu negara. beberapa Indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah kualitas sumber daya baik dari sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, pembangunan wilayah yang bias, rendahnya produktifitas masyarakat, dan terbatasnya sarana prasaran yang dibutuhkan dan didapatkan oleh masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara juga harus melakukan pemerataan pendapatan baik secara makro dan mikro, pendapatan secara mikro adalah pemerataan pendapatan perkapita bagi masyarakat. Oleh karena itu peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Dan dasar dari keberhasilan pembangunan juga dapat dilihat dari meratanya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan distribusi pendapatan perkapita yang merata dan kecilnya ketimpangan pendapatan serta pembangunan antar wilayah dan penduduk.

Ketimpangan pembangunan menjadi hal penting juga yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Ketimpangan bisa dilihat dari beberapa aspek misalnya ketimpangan pendapatan yang ekstrem menyebabkan inefisiensi ekonomi. Penyebab sebagian adalah pada tingkat pendapatan rata-rata berapa pun ketimpangan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit yang lain. Lebih lanjut dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, tingkat tabungan secara keseluruhan dalam perekonomian cenderung rendah, karena tingkat tabungan marjinal tertinggi biasanya ditemukan pada kelas menengah (Todaro, 2006:248).

Dengan adanya dampak negatif yang ditimbulkan ketimpangan pembangunan wilayah, maka pemerintah harus mampu membuat regulasi atau kebijakan yang lebih peduli tentang penanggulangan ketimpangan pembangunan, namun saat ini di era demokrasi dengan adanya otonomi daerah sangat membantu dalam pemerataan pembangunan. Otonomi daerah merupakan jalan nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ketimpangan pembangunan. Setiap wilayah diberi kesempatan untuk mengembangkan wilayahnya secara semaksimal mungkin. Segala kebijakan pembangunan daerah diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga kebijakan tidak lagi bersifat *Top down*/Sentralistik. Pemerintah daerah berhak melakukan kebijakan apapun untuk ditetapkan diwilayah namun harus tetap selaras dengan konsep dasar pembangunan nasional.

Eks Karesidenan Besuki menjadi objek penelitian ketimpangan pembangunan kali ini. Eks Karesidenan Besuki terdiri dari Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi. Ke empat kabupaten ini merupakan daerah-daerah yang saling bekerjasama. Kerjasama ini bisa dalam bentuk pengembangan produk daerah, pengembangan industri dan merangsang kegiatan ekonomi lainnya. Ini diharapkan akan menjadi peluang untuk semua wilayah Eks Karesidenan Besuki untuk dapat saling melengkapi serta menunjang kekurangan dari setiap wilayah. Karena dengan adanya kerjasama ini akan menimbulkan pemerataan dari distribusi produktifitas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam yaitu, seberapa besar angka ketimpangan di wilayah Eks Karesidenan Besuki, Klasifikasi pola pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten di wilayah Eks Karesidenan Besuki serta bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan terhadap kemiskinan di wilayah Eks Karesidenan Besuki.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis (Sugiyono, 2011: 7)

Unit Analisis dan Populasi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah analisis pembangunan dalam prespektif indeks kesejahteraan di Eks Karesidenan Besuki tahun 2006-2013. Penelitian ini dilakukan di wilayah Eks Karesidenan Besuki yang meliputi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo. Pemilihan lokasi penelitian di wilayah Eks Karesidenan Besuki dari tahun 2006-2013, karena ingin meneliti bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi, ketimpangan serta pola struktur pertumbuhan dari ke empat kabupaten tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumber pengumpulannya, maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku ataupun dokumen dari perusahaan yang dapat dijadikan data penelitian.

Data diperoleh dari objek penelitian yang sudah terolah dan dalam bentuk dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini. Prosedur pengumpulan data diperoleh dengan cara mengutip dan menyalin data yang telah tersedia di Badan Pusat Statistik Jatim, Badan Pusat Statistik dari ke 4 Kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo), Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA) serta Lembaga/Instansi lain yang terkait dalam penelitian ini.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. dengan menggunakan analisis statistik regresi data panel.

- a. Indeks Ketimpangan Williamson, analisis yang digunakan sebagai indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) dengan rumusan :

$$IW =$$

- b. Alat analisis Tipologi Klassen atau disebut juga Tipologi Daerah digunakan untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama yaitu Laju pertumbuhan ekonomi di wilayah Eks Karesidenan Besuki dan pendapatan perkapita daerah (Kabupaten). Dalam tipologi klasenakan terdapat pengelompokan daerah :

1. Kuadra I : Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (*high growth and high income*)
2. Kuadra II : Daerah maju tapi tertekan (*high incsssme but low growth*)
3. Kuadran III : Daerah Berkembang cepat (*high growth but low income*)
4. Kuadran IV : Daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*)

- c. Metode penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel.

Dimana :

KM = Kemiskinan

b0 = Efisiensi

b1, b2 = Elastisitas parameter regresi untuk LPE, PE

LPE = Pertumbuhan Ekonomi

PE = Pendapatan Perkapita daerah

et = Error term (variabel gangguan)

Penelitian ini menjelaskan tentang Analisis Pembangunan Wilayah dalam Prespektif Indeks Kesejahteraan di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2006 - 2013. Penelitian ini membahas 3 permasalahan yang pertama, membahas tentang bagaimana tingkat ketimpangan pembangunan di Eks Karesidenan Besuki, kedua Bagaimana klasifikasi pola pertumbuhan ekonomi di Eks Karesidenan Besuki dan yang ketiga menganalisis pengaruh variabel LPE (laju pertumbuhan ekonomi) dan variabel PE (pendapatan perkapita kabupaten) terhadap jumlah penduduk miskin di Eks Karesidenan Besuki.

1. Pembahasan Analisis Indeks William di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2006-2013

Berdasarkan hasil analisis data Indeks William di wilayah Eks Karesidenan Besuki dapat kita lihat hasil dari jumlah ketimpangan yang terjadi di ke-4 Kabupaten yang ada yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Angka ketimpangan di Eks Karesidenan Besuki yang diakumulasi dari perkembangan pendapatan perkapita 4 kabupaten, jumlah penduduk 4 kabupaten, pendapatan perkapita provinsi Jatim dan jumlah penduduk provinsi Jatim. Angka ketimpangan di Eks Karesidenan Besuki selama tahun 2006-2013 rata-rata sebesar 0,147, angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang rendah karena < 1 . Eks Karesidenan Besuki memiliki angka ketimpangan yang tergolong rendah namun hal ini bukanlah menjadi tolak ukur dari kesejahteraan yang diterima masyarakat, masih terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan di antara ke-4 kabupaten yang ada di Eks Karesidenan Besuki. Kabupaten Bondowoso memiliki pendapatan perkapita yang paling rendah di Eks Karesidenan Besuki hal ini bisa menjadi tingkat kesejahteraan yang diterima masyarakat Bondowoso lebih rendah dibandingkan 3 kabupaten yang lain diantaranya Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo.

2. Pembahasan Analisis Tipologi Klasen di Eks Karesidenan Besuki Tahun 2006-2013.

Hasil dari analisis pola pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan alat tipologi klasen, menggambarkan bahwa wilayah Eks Karesidenan Besuki yang terdiri dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo masuk dalam kuadran IV yang berarti masih tergolong daerah relatif tertekan/tertinggal. Ke-4 Kabupaten tersebut masuk dalam kuadran ke IV karena laju pertumbuhan ekonomi maupun PDRB Perkapita ke-4 kabupaten tersebut lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil dari perhitungan dari analisis tipologi klasen.

3. Hasil Regresi

Pembahasan ini akan menjabarkan tentang hasil perhitungan regresi dari variabel dependen Kemiskinan (KM) yang diproksi dengan jumlah penduduk miskin dan variabel independen yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Pendapatan Perkapita (PE).

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect*, hasil pengujian secara simultan (uji f) menunjukkan nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0,000000 dan nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi α 5% = 0,05, sehingga artinya variabel LPE dan PE secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Eks Karesidenan Besuki yang terdiri dari 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo.

Uji t yakni pengujian yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah LPE dan PE sedangkan variabel dependennya adalah KM. Pengujian secara individu ini menggunakan tingkat signifikansi atau nilai α 5% = 0,05, Laju Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai elastisitas regresi yang positif sebesar 0,110851. Angka tersebut dapat diartikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi naik 1% maka terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,110851%. Namun angka tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan. Pendapatan Perkapita memiliki nilai elastisitas regresi yang negatif sebesar -1,126482. Angka tersebut dapat diartikan bahwa jika pendapatan perkapita naik 1% maka terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,126482%. Dan angka tersebut signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan.

Hasil koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,973596 atau 97,3596% kemiskinan di Eks Karesidenan Besuki dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Sedangkan untuk sisanya sebesar 2,6404% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

1. Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai elastisitas regresi yang positif sebesar 0,110851. Angka tersebut dapat diartikan bahwa jika pertumbuhan ekonomi naik 1% maka terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 0,110851%. Namun angka tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi kemiskinan. Secara teoritis pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan, namun sangat berbeda pada kondisi nyata perkenomian di

setiap daerah yang ada di Eks Karesidenan Besuki. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal misalnya saja pertumbuhan ekonomi yang tidak sama di setiap daerah, sehingga naiknya pertumbuhan ekonomi tidak serta merta mampu menurunkan dan mengurangi jumlah kemiskinan, dengan kata lain naiknya pertumbuhan ekonomi belum berperan secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Eks Karesidenan Besuki. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kurang optimal dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi tersebut masih relatif belum cukup tinggi atau masih rendah. Okun dalam Samuelson (2005) menyatakan bahwa untuk setiap 2% penurunan GNP tingkat pengangguran meningkat 1%. Jadi apabila GNP semula 100% dan kemudian menjadi 98%, maka tingkat pengangguran melonjak dari 6% ke 7%. ketika tingkat pengangguran semakin tinggi maka jumlah penduduk miskin juga akan meningkat. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi di kawasan Eks Karesidenan Besuki masih relatif rendah dan lambat, tentu hal ini berakibat pada lambatnya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya. Laju pertumbuhan ekonomi bukanlah salah satu variabel yang dapat memecahkan atau mengurangi jumlah penduduk miskin. Masalah kemiskinan tidak dapat hanya di pecahkan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*) pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk

mengurangi kemiskinan, syarat kecukupan (*sufficient condition*) misalnya laju inflasi serta laju populasi penduduk juga haruslah terkendali. Karena dengan peningkatan jumlah penduduk yang besar maka investasi yang dikeluarkan untuk pelayanan publikpun juga akan sangat tinggi.

2. Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Kemiskinan

Variabel pendapatan perkapita menunjukkan pengaruh yang signifikan negatif terhadap kemiskinan di Eks Karesidenan Besuki artinya jika terjadi kenaikan terhadap pendapatan perkapita maka jumlah penduduk miskin di Eks Karesidenan Besuki akan menurun. Pendapatan perkapita juga bisa menjadi tolak ukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu yang sudah ditentukan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Wiguna (2013), pada penelitian tersebut mengindikasikan bahwa apabila PDRB perkapita meningkat maka penduduk di wilayah tersebut semakin sejahtera atau apabila PDRB perkapita meningkat maka tingkat kemiskinan akan berkurang.

Menurut Todaro (dikutip dari Tabuna, 2001) Ketika angka pendapatan perkapita lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk hal ini otomatis akan terjadi peningkatan kemakmuran masyarakat yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Kreteria Ketimpangan ada 3 yaitu; ketimpangan tinggi $IW > 0,5$, ketimpangan sedang $0,35-0,5$, dan ketimpangan rendah $IW < 0,35$. Berdasarkan kriteria tersebut Eks Karesidenan Besuki tergolong rendah dimana angka ketimpangan $< 0,35$.
2. Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klasen di Eks

Karesidenan Besuki :

1. Kabupaten Jember masuk dalam kuadran IV (daerah relatif tertinggal).
2. Kabupaten Banyuwangi masuk dalam kuadran IV (daerah relatif tertinggal).
3. Kabupaten Bondowoso masuk dalam kuadran IV (daerah relatif tertinggal).
4. Kabupaten Situbondo masuk dalam kuadran IV (daerah relatif tertinggal).

c. Hasil perhitungan pengaruh antara variabel independen LPE (laju pertumbuhan ekonomi), PE (pendapatan perkapita) terhadap variabel dependen KM (kemiskinan).

1. Variabel LPE (laju pertumbuhan ekonomi) memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Eks Karesidenan Besuki tahun 2006-2013, variabel PE (pendapatan perkapita) memiliki hubungan yang negatif dan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Eks Karesidenan Besuki tahun 2006-2013.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah di wilayah EKS Karesidenan Besuki perlu menjalankan fungsinya sebagai *Agent Of Development* dengan melakukan pemerataan program pembangunan yang dapat menjangkau seluruh wilayah di masing-masing kabupaten baik dari segi pembangunan fisik/infrastruktur diberbagai aspek, permodalan pada sektor-sektor usaha masyarakat, dan pemberdayaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui Government Expenditure dan dapat juga membuka kran Investasi oleh pihak swasta, sehingga persoalan ketimpangan yang ada dapat di minimalisir melalui redistribusi program pembangunan.
2. Pemerintah daerah di wilayah EKS Karesidenan Besuki harus segera melakukan percepatan pembangunan di masing-masing wilayah dengan membangun fasilitas-fasilitas yang mampu mendorong terciptanya aktifitas ekonomi masyarakat. Sehingga akan timbul sektor-sektor usaha baru dari berbagai potensi yang ada pada masing-masing daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Pembangunan ekonomi yang progresif merupakan pembangunan yang mengarah pada potensi-potensi daerah yang ada, dalam hal ini konsepsi yang tepat untuk mengeksplorasi potensi daerah tersebut adalah OVOP (*One Vilage One Product*) pada Kabupaten di EKS Karesidenan Besuki, dimana suatu daerah harus didorong untuk menciptakan produk-produk unggulan di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian, jasa dan sektor-sektor yang lain yang menjadi ciri khas dari masing-masing wilayah. Peran yang dapat diambil oleh pemerintah dalam proses pelaksanaan program OVOP dengan melalui penyediaan sumber daya yang bisa mengcover baik dari segi permodalan, penyediaan

fasilitas-fasilitas untuk pemasaran, akses informasi, dan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia yang ada.

Daftar Pustaka

- [1] Arsyad, Lincolyn. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIE YKPN
- [2] Aryad, Linolyn. 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIE YKPN.
- [3] Delis, A. R. Dan Sari, N. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah Di Indonesesia Periode 1990-2008*. Fakultas Ekonomi: UNJA
- [4] Indrawan. M. I. 2008. *Analisis Kondisi Infrastruktur Perekonomian Terhadap Produktivitas Dunia Usaha Kota Medan*. Jurnal Ekonomi Vol 1 No 1. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Pana Budi Medan.
- [5] Kuncoro. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

